

### **BAB III**

## **ALASAN DAN PERMASALAHAN INVESTASI ASING DI JAWA TENGAH**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan alasan yang terdiri dari hal-hal yang dapat menarik investor asing untuk menanamkan modal di Provinsi Jawa Tengah. Diikuti dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam aktivitas investasi asing yang berjalan di Provinsi Jawa Tengah. Serta perbandingan realisasi investasi asing Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi sekitar.

#### **A. Alasan Melakukan Aktivitas Penanaman Modal Asing di Jawa Tengah**

Menurut penuturan Bapak Purwanto selaku perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah memulai investasi sejak tahun 1970 dan diawali oleh industri tekstil yang berada di Pekalongan.<sup>1</sup> Sebagai Gubernur Jawa Tengah sejak 2013, Bapak H. Ganjar Pranowo, S.H., M.IP. memberikan kemudahan kepada investor yang hendak menanamkan modalnya di Jawa Tengah seperti perbaikan infrastruktur dan pemangkasan perizinan dengan kemudahan investasi langsung konstruksi yang ditetapkan di empat kawasan industri yang tersebar di Semarang dan Kendal.

Investasi atau penanaman modal asing (PMA) merupakan salah satu bagian dari aliran modal yang masuk ke suatu daerah sebagai aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai resiko kecil dibandingkan dengan aliran modal

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Purwanto, tanggal 3 Desember 2016 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

lainnya. Penanaman modal asing memiliki sifat permanen (jangka panjang) memiliki manfaat seperti:

- Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk pada wilayah investasi di Jawa Tengah. Membantu dalam penyerapan tenaga kerja lebih banyak sehingga mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dengan diberi keterampilan/keahlian dan ilmu pengetahuan.
- Membantu upaya pembangunan kepada perekonomian wilayah penerima. Karena sumber dana modal asing dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
- Memberikan keuntungan transfer teknologi bagi wilayah penerima dan memantau proses industrialisasi yang sedang dilaksanakan.
- Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dapat menjadi tolak ukur kondisi ekonomi pada waktu sebelumnya.<sup>2</sup>

Investasi dilakukan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Berarti dalam kegiatan investasi ini terdapat pihak-pihak yang memperoleh keuntungan baik pihak penanam modal maupun pihak tuan rumah yang mengizinkan investor asing untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Akan tetapi sebelum menanamkan modal, tentunya pihak penanam modal yang akan menanamkan modalnya di Jawa Tengah memiliki alasan mengapa mereka diharapkan berkenan menanamkan modalnya di tempat tersebut. Beberapa alasannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Mohtar Masoed. (1997). *“Bahan Kuliah Perusahaan Multinasional Dalam Ekonomi Politik Internasional, Ilmu Hubungan Internasional”*. Yogyakarta: Fisipol UGM. hlm. 129.

- Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang dikenal memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan memiliki luas lahan yang potensial. Serta kondisi Jawa Tengah yang strategis sehingga termasuk kawasan industri potensial.
- Infrastruktur yang semakin meningkat atau dengan adanya sarana yang mendukung iklim investasi seperti keberadaan Bandara Udara Internasional seperti Bandara Achmad Yani di Kota Semarang dan Bandara Adi Sumarmo di Kota Solo. Serta Pelabuhan seperti Pelabuhan Tanjung Emas di Kabupaten Semarang dan Pelabuhan Intan Cilacap yang melayani pelayaran nasional dan internasional.<sup>3</sup> Serta adanya jalur *Trans Tol Java* dan jalur kereta api yang melalui titik-titik strategis di Jawa Tengah dan Jawa.
- Iklim politik dan sosial di Jawa Tengah yang kondusif memungkinkan terciptanya iklim investasi yang stabil dan baik. Sehingga membuat investor tertarik menanamkan modalnya di Jawa Tengah.
- Dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap investasi. Karena kondisi investasi di suatu wilayah tidak hanya bergantung pada kondisi lingkungan, melainkan sikap pemerintah yang pro-investasi. Seperti memperbaiki unit layanan perizinan mulai dari pusat dan daerah kemudian mencabut Perda yang tidak mendukung investasi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> BKPM. (2016). “*Alasan Berinvestasi*” . Badan Koordinasi Penanaman Modal, diakses <http://www2.bkpm.go.id/id/peluang-investasi/peluang-berdasarkan-subdaerah/jawa-tengah1>, pada Sabtu 4 Maret 2017.

<sup>4</sup> Tribun Jateng. (2016), “*Modal Asing di Jateng Capai Rp 5,2 Triliun, Iklim Investasi Sangat Menjanjikan*”. Tribun Jaten, diakses dari <http://jateng.tribunnews.com/2016/10/05/modal-asing-di-jateng-capai-rp-52-triliun-iklim-investasi-sangat-menjanjikan?page=z> pada 4 Maret 2017.

- Jumlah tenaga kerja yang berpotensi untuk industri padat karya dan semakin terbukanya peluang untuk pengelolaan ekonomi strategis.<sup>5</sup> Sehingga, upah di Jawa Tengah tergolong kompetitif sesuai dengan kinerja. Dengan upah minimum regional tahun 2013 yaitu Rp830.000,00; 2014 sebesar Rp 910.000/bulan dan Rp 1.100.000,00/bulan pada tahun 2015.
- Realisasi investasi di Jawa Tengah yang meningkat dari tahun 2013-2015

**Tabel 3.1 Realisasi Penanaman Modal Asing Tahun 2008 – 2015**

Provinsi	Investasi							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jawa Tengah (dalam juta US\$)	135,6	83,1	59,1	175	241,5	464,3	463,4	850

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dengan melihat kondisi politik, ekonomi dan moneter yang mendukung tujuan utama mereka untuk berinvestasi yaitu mendapatkan keuntungan. Investor asing juga memiliki pertimbangan sebelum menanamkan modal seperti, *pertama* pemberian informasi kepada investor menjadi dasar bagi terciptanya transparansi atau keterbukaan di pasar modal. Informasi ini akan menjadi landasan investor untuk mengadakan analisis sebelum mengambil keputusan investasi. Dengan demikian informasi ini harus menjamin adanya kebenaran yang didukung oleh data yang lengkap, akurat dan *up to date*. Karena apabila tidak ada transparansi selama proses investasi dapat sangat membatasi perhatian investor asing. *Kedua* jaminan

---

<sup>5</sup> BPMD. (-), “Rencana Strategi BPMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018. Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah. hlm. 29.

rasa aman, apabila disuatu negara terjadi banyak pemberontakan, ketidakstabilan sosial dan politik, investor akan enggan menanamkan dana di negara tersebut. Pertimbangannya ialah resiko yang terlalu besar dibandingkan dengan hasil yang didapat dari investasi. Investor akan tertarik menanamkan uang apabila suatu negara setidaknya memiliki pemerintahan yang stabil, hukum dan peraturan yang jelas, serta kondisi ekonomi dan moneter yang dapat mengakomodasikan kemajuan dunia usaha. *Ketiga* tingkat bunga suatu negara serta perubahan nilai tukar mata uang terhadap dolar di negeri tersebut akan menjadi dasar perhitungan investasi para penanam modal asing untuk memudahkan para investor berinvestasi.<sup>6</sup> *Keempat*, adanya kepastian hukum dan jaminan hukum yang mencegah kesewenang-wenangan terhadap penanam modal dan proses investasi yang sedang berjalan.

Sedangkan bagi pihak penerima modal harus memiliki kesadaran terhadap kondisi lingkungan ketika membuka wilayah mereka kegiatan ekonomi strategis seperti investasi yang mampu mengangkat bahkan menjatuhkan kondisi mereka. Kesadaran yang harus dimiliki oleh pihak penerima modal seperti pihak penerima harus sadar bahwa kondisi sosial, politik, ekonomi negaranya menjadi pusat perhatian investor karena kualitas suatu negara atau wilayah dapat diukur melalui kekuatan (*power*). Pihak penerima juga harus mampu melaksanakan investasi dengan prinsip saling menguntungkan. Pertimbangan yang dilakukan pihak

---

<sup>6</sup> E. A Koentini. (1997), "*Pasar modal indonesia*". Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset. hlm. 185.

penerima modal tidak lain untuk mencegah tindakan yang merugikan negara penerima investasi dalam segi ekonomis jangka panjang dan pendek.

## **B. Permasalahan Yang Terjadi di Tengah Aktivitas Penanaman Modal Asing**

Permasalahan merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.<sup>7</sup> Atau suatu keinginan yang tidak dapat terwujud sesuai kehendak yang diinginkan. Dalam skripsi ini berarti permasalahan yang ada ialah sesuatu yang berbentuk aktivitas maupun kondisi lingkungan dan organisasi yang menghalangi aktivitas penanaman modal asing (PMA) di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga aktivitas penanaman modal asing (PMA) tidak berjalan sesuai rencana bahkan tidak dapat berjalan dengan maksimal karena adanya masalah yang menjadi jarak. Permasalahan yang menyebabkan tidak optimalnya aktivitas penanaman modal asing diantaranya sebagai berikut :

### **1. Kualitas Birokrasi**

Birokrasi berasal dari dua kata yaitu *biro* yang artinya meja dan *krasi* yang artinya kekuasaan. Dapat dikatakan apabila pengertian birokrasi adalah kekuasaan yang bersifat formal yang didasarkan pada peraturan atau Undang-Undang dan prinsip-prinsip cara kerja organisasi. Kualitas birokrasi menjadi salah satu hal penting untuk mendukung kegiatan investasi asing. Salah satu unsur yang mendukung birokrasi ialah kualitas pelayanan organisasi penanaman modal Jawa Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan

---

<sup>7</sup> James AF Stonner. (1982). "*Principals of Management II Edition*". -: Prentice-Hall. hlm. 25.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terhadap calon investor asing bahkan investor asing. Melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 atas perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012, Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.<sup>8</sup>

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sejak 2012 hingga tahun 2025 untuk mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Provinsi Jawa Tengah. Untuk mendukung pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) maka diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh birokrat di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian wewenang, pendelegasian kewenangan dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Melihat kondisi penanaman modal asing yang terjadi saat ini sangat dibutuhkan adanya dukungan kebijakan yang baik guna mendorong

---

<sup>8</sup> Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah

persebaran penanaman modal yang memperhatikan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Sistem pelayanan yang efektif dan efisien, serta terhindarnya dari benturan kepentingan menjadi pertimbangan utama calon investor asing . Adanya fasilitas insentif penanaman modal yang semakin kompetitif akan mendorong daya saing dan meningkatkan minat pemodal baik dari dalam maupun luar negeri. Keselarasan dan kesederhanaan kebijakan antar instansi akan berimplikasi pada membaiknya permasalahan yang ada pada daya saing penanaman modal. Daya saing penanaman modal yang ada salah satunya ialah kepastian hukum untuk menunjang keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. pelayanan penanaman modal yang semakin cepat dan efisien, sistem informasi yang semakin luas dan akses data yang semakin cepat serta kemajuan kinerja kelembagaan adalah faktor-faktor yang mendukung tercapainya harmonisasi kebijakan.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal asing ialah dengan berpijak pada sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Sistem pelayanan satu atap ini diharapkan dapat mengakomodasi keinginan investor/pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah dan cepat. Membangun

sistem pelayanan satu atap diperlukan visi, misi dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintah yang berkepentingan dalam penanaman modal.

Sehingga pada intinya, permasalahan yang menjadi kendala aktivitas investasi asing dalam lingkup birokrasi ialah :

- 1) Masih terdapatnya regulasi yang kurang mendukung kegiatan penanaman modal. Keluhan investor selama ini ialah dalam hal pengurusan izin yang berbelit-belit karena birokrasi yang panjang. Masalah koordinasi perizinan semakin parah setelah diberlakukannya otonomi daerah, karena dengan diberlakukannya otonomi daerah banyak peraturan pemerintah dan presiden yang tidak bisa berjalan efektif karena adanya tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang semuanya merasa paling berkepentingan atas penanaman modal di daerah. Dalam kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi kabupaten dan kota diberikan kewenangan dalam bidang penanaman modal. Namun sejak adanya otonomi daerah, pemerintah pusat terpaksa mengeluarkan keputusan Presiden khusus mengenai penanaman modal karena banyaknya kendala yang dihadapi oleh para investor yang ingin membuka usaha di daerah, khususnya yang berkaitan dengan proses perizinan usaha. Karena investor sering dibebani oleh urusan birokrasi yang berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan disertai dengan

biaya tambahan yang cukup besar. Persoalan ini muncul karena penafsiran yang berbeda antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengenai wewenang dalam pengurusan penanaman modal di daerah.<sup>9</sup>

2) Belum semua birokrat menjalankan fungsi promosi, pelayanan perizinan dan pengendalian penanaman modal. Pemberian kemudahan promosi dan pengendalian penanaman modal juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Karena bertujuan untuk mendorong daya saing dan mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu.<sup>10</sup>

3) Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu. Terbatasnya infrastruktur juga menjadi hambatan penanaman modal yang belum sepenuhnya dapat teratasi. Pembenahan infrastruktur perlu diperhatikan sebagai bagian dari pengembangan penanaman modal

---

<sup>9</sup> Tulus Tambunan. “*Kendala Perijinan Investasi*”, dalam *Kendala Perijinan dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan yang Perlu Dilakukan Pemerintah*, 6 Februari 2008.hlm. 6.

<sup>10</sup> Berita Daerah. (2014) . “*Permasalahan Investasi di Indonesia*”. Diakses dari <http://beritadaerah.co.id/2014/12/10/10-permasalahan-investasi-di-indonesia/> pada 14 Februari 2017.

dalam upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri serta mendukung kedaulatan Indonesia.

- 4) Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi terbaru dalam menunjang pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Karena dapat kita lihat apabila informasi yang tersaji dalam *website* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya tersaji dalam Bahasa Inggris; belum semua informasi tersaji dengan *up to date*; belum semua informasi tersaji dengan lengkap dan detail yang bisa memudahkan investor asing mendapatkan informasi dengan mudah melalui media elektornik internet. Maka dari itu perlu adanya perbaikan *website* agar semua orang dapat memperoleh informasi yang akurat melalui internet, terutama bagi investor asing yang ingin menanamkan modal di Jawa Tengah dapat memperoleh informasi dan mendapatkan keyakinan yang lebih sebelum mereka ingin benar-benar menanamkan modalnya di Jawa Tengah tanpa harus jauh-jauh datang langsung ke wilayah tujuan investasi mereka.

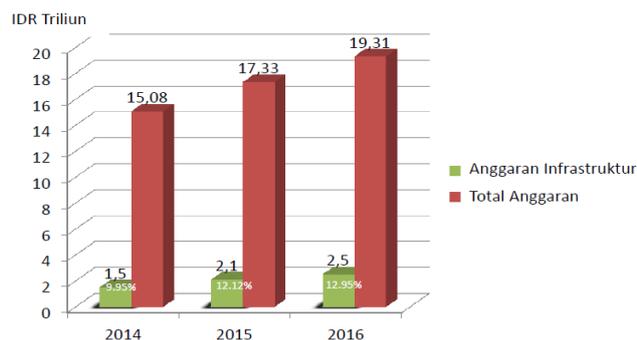
## **2. Realisasi Penanaman Modal Asing di Jawa Tengah**

Realisasi investasi merupakan tindakan atau proses untuk mewujudkan penanaman modal yang akan memberikan keuntungan di

masa mendatang.<sup>11</sup> Tindakan ini dimulai dengan menetapkan target yang ingin dicapai sesuai batas waktu tertentu, kemudian dibuat rencana atau strategi untuk mewujudkannya, kemudian rencana tersebut dilaksanakan dalam bentuk tindakan nyata. Setelah tindakan tersebut selesai, kemudian dilakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai, apakah sudah sesuai target atau tidak.

Suatu rencana peningkatan ekonomi tidak akan terwujud tanpa adanya realisasi, termasuk kegiatan investasi asing di Jawa Tengah. Dengan anggaran yang disediakan Pemerintah Daerah, maka realisasi investasi akan semakin mudah terwujud agar dapat memenuhi target. Untuk Jawa Tengah sendiri anggaran yang disediakan ialah sekitar 15-20 Triliun, bahkan bervariasi dari tahun ke tahun karena kondisi yang dapat mempengaruhi investasi serta kebutuhan akan infrastruktur yang menyangkut investasi asing.<sup>12</sup>

**Gambar 3.1 Anggaran Investasi Asing Provinsi Jawa Tengah**



<sup>11</sup> Muhammad Abdi Amma. (2015). “Ini Alasan Indef Pertanyakan Data Investasi Dari BKPM”. Bisnis, diakses dari <http://m.bisnis.com/industri/read/20150730/257/457600/ini-alasan-indef-pertanyakan-data-investasi-dari-bkpm>, pada 4 Mei 2017

<sup>12</sup> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2016). “Peluang Investasi Jawa Tengah”. Semarang: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. hlm. 40.

Sumber : Slide Peluang Potensi Jawa Tengah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Dalam membandingkan realisasi investasi asing Jawa Tengah, akan menggunakan Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan investasi asing tahun 2013-2015.

**Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Investasi PMA 2013 -2015**

Provinsi	Proyek			Investasi (dalam juta US\$)		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Jawa Barat	1.542	1.671	4.497	7.124,90	6.562,00	5.739
Jawa Tengah	199	224	608	464,30	463,40	50
Yogyakarta	62	48	130	29,60	64,90	89
Jawa Timur	636	497	7422	3.396,30	1.802,50	2.593

Sumber : Realisasi Investasi Asing Berdasarkan Wilayahnya dalam juta US\$ tahun 2006-2015. Badan Koordinasi Penanaman Modal

Jawa Tengah yang letaknya di antara Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta tentu memiliki rasa persaingan dalam segala bidang termasuk investasi asing. Dibandingkan ketiga Provinsi yang lain Jawa Tengah berada pada posisi ke-3 setelah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur sedangkan Daerah Istimewa Yogyakarta berada di bawah Jawa Tengah. Alasan realisasi investasi asing yang berbeda-beda disebabkan oleh beberapa alasan seperti wilayah yang mendukung investasi asing, penerapan kebijakan penanaman modal, jaminan terhadap investor, kondisi infrastruktur bahkan upaya pemerintah dalam menggebrak pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing

Meskipun realisasi investasi asing Jawa Tengah berada di bawah Jawa Barat dan Jawa Timur, dari hasil evaluasi realisasi investasi asing tahun 2015 sesuai masing-masing sektor Jawa Tengah mengungguli Jawa Barat pada sektor industri tekstil dimana selama ini tidak kita ragukan lagi perekonomian Jawa Barat dalam segi tekstil sehingga mendapat julukan “Paris Van Java”. Hal ini menjadikan ketua BKPM saat itu Franky Siarani tidak menyiayikan perubahan investasi Jawa Tengah yang berhasil melonjak meskipun dalam satu sektor. Maka dari itu, Jawa Tengah sejak tahun 2015 menjadi kiblat baru bagi investasi tekstil di Indonesia. Dengan melonjaknya realisasi investasi asing sektor industri tekstil inilah menjadi salah satu alasan total realisasi investasi asing wilayah tersebut secara keseluruhan melonjak tinggi dibandingkan dengan tahun 2014. Berbeda dengan Jawa Tengah, realisasi investasi asing Jawa Barat pada tahun 2015 justru menurun daripada realisasi investasi asing tahun sebelumnya. Bahkan Jawa Barat menjadi Provinsi yang nilai realisasi investasi pada tahun 2015 mengalami penurunan, berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogyakarta.

### **3. Kualitas Sumber Daya Manusia**

Faktor sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu masalah yang timbul selama pelaksanaan aktivitas investasi asing. Dimana SDM yang dimaksud ialah kualitas SDM dari aparat birokrat dan SDM dari masyarakat yang berada di wilayah investasi yang diharapkan dapat

menjadi bagian dari aktivitas investasi asing di wilayahnya.<sup>13</sup> Masih kurangnya kompetensi SDM yang membidangi promosi dan kerjasama, pelayanan perizinaan, pengendalian dan pengembangan di bidang penanaman modal serta kurangnya kompetensi dan kuantitas SDM pada bidang pelayanan perizinan menjadi masalah SDM yang ada pada lingkup birokrat. Masalah-masalah tersebut muncul dan mengakibatkan adanya penurunan kualitas birokrasi penanaman modal di masing-masing daerah. Kualitas SDM birokrat menjadi hal penting karena keberhasilan mereka dalam mengundang calon investor asing untuk menanamkan modalnya di Jawa Tengah ialah tergantung pada upaya yang mereka lakukan melalui pelayanan terhadap calon investor asing. Keberhasilan upaya birokrasi sendiri dipengaruhi oleh faktor individu masing-masing terhadap kemampuan mereka baik dalam segi penguasaan materi investasi dan cara birokrat dalam memberikan pengenalan mengenai potensi maupun kondisi wilayah pada saat promosi. Tidak hanya ketika promosi, pada pelayanan perizinaan, pengendalian dan pengembangan juga diperlukan sifat kreatifitas dan inovatif masing-masing aparat sehingga dapat menjaga nama baik wilayah. Selain itu kualitas birokrat yang lainnya ialah kemampuan mereka dalam hal kejujuran, keterampilan dan disiplin. Ketiga hal tersebut menjadi penting karena apabila aparat birokrat tidak menjunjung tinggi nilai kejujuran, mungkin saja bisa terjadi praktek

---

<sup>13</sup> Sutarto. (2008). “*Menko Budiono Akui Pembangunan Ekonomi Belum Berhasil*”. Tempo, diakses dari <https://m.tempo.co/read/news/2007/10/22/056109877/menko-boediono-akui-pembangunan-ekonomi-belum-berhasil>, pada 4 Mei 2017.

penyimpangan kebijakan. Sedangkan keterampilan wajib dimiliki karena apabila aparat birokrat tidak memiliki keterampilan meskipun mereka memiliki kecerdasan yang unggul akan berpengaruh pada segala macam situasi ketika masing-masing aparat birokrat mengolah data. Sedangkan disiplin menjadi pendukung kualitas SDM karena dengan kedisiplinan yang dimiliki oleh aparat birokrat baik disiplin ketika melaksanakan promosi maupun pelayanan, maka calon investor asing akan merasa dihormati.

Kualitas SDM yang menjadi keluhan investor asing ialah kemampuan dan keterampilan masyarakat lokal yang tidak sepadan dengan yang dibutuhkan oleh investor asing. Masalah ini sendiri muncul karena faktor manusia yang dilatarbelakangi pendidikan mereka yang rendah. Pendidikan yang rendah sendiri dikarenakan kesadaran masyarakat lokal yang kurang tentang pentingnya pendidikan untuk menunjang kehidupan mereka di masa depan. Kurangnya kesadaran akan pendidikan juga dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap proses pendidikan yang berlaku.

Permasalahan-permasalahan tersebut diatas dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas birokrasi atau kualitas pelayanan publik. Karena dengan dimulai dari perbaikan birokrat atau SDM pada organisasi penanaman modal, secara tidak langsung juga akan merubah aktivitas pelayanan penanaman modal dan akan menjadi langkah untuk memperbaiki kondisi penanaman modal asing di Provinsi Jawa Tengah.